# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024




**NOMOR** : 01.A/LKJIP/DISDIK-RIAU/SEKR/2025
**TANGGAL** : 31 JANUARI 2025

**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**
Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Pekanbaru

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, Maret 2025
**INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,**

**SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE**
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19710729 199302 1 003

Dipindai dengan CamScanner

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya Dinas Pendidikan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur Riau, menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. Laporan Kinerja tahun 2024 merupakan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tahun akhir untuk periode perencanaan sesuai Renstra tahun 2019-2024. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2024 Dinas Pendidikan. Selain capaian kinerja tahun 2024, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2019-2024 Dinas Pendidikan.

Tahun 2024 Dinas Pendidikan melaksanakan lima program pembangunan pendidikan. Melalui kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dengan baik. Dinas Pendidikan sadar meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pendidikan masih banyak dan memerlukan kerja lebih keras pada tahun–tahun mendatang.

Tantangan seperti memperbaiki layanan pendidikan bermutu sesuai dengan SPM dan SNP, membentuk insan Indonesia yang berkarakter dan beradab, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan selama tahun 2024. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan perumusan kebijakan bidang pendidikan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja tahun 2024 Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Pekanbaru, 31 Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
**PROVINSI RIAU**




**EDI RUSMA DINATA, S.Pd, M.Pd**
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720822 199702 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... vi
DAFTAR GRAFIK ..... vii
DAFTAR LAMPIRAN ..... viii
BAB I PENDAHULUAN .....
1.1 LATAR BELAKANG ..... 1
1.2 LANDASAN HUKUM ..... 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ..... 3
1.4 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..... 3
1.5 STRUKTUR ORGANISASI ..... 21
1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI ..... 22
1.7 PERMASALAHAN UTAMA ..... 30
1.8 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP ..... 32
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 ..... 33
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 ..... 35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ..... 37
3.2 REALISASI ANGGARAN ..... 66
BAB IV PENUTUP
4.1 KESIMPULAN UMUM ..... 68
4.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS ..... 70

# DAFTAR TABEL

1.1 Kondisi ASN/Pegawai berdasarkan Jabatan ..... 24
1.2 Klasifikasi ASN menurut Pendidikan..... 24
1.3 Rekapitulasi Aset/Sarana Prasarana Dinas Pendidikan ..... 25
1.4 Rekapitulasi Aset Jumlah Barang Dinas Pendidikan ..... 27
1.5 Rekapitulasi Aset Jumlah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta ..... 30
1.6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... 31
2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau ..... 34
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 ..... 36
3.1 Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah ..... 38
3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2024..... 38
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun ini dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2024)..... 39
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun ini Dengan Nasional..... 39
3.5 Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah..... 40
3.6 Harapan Lama Sekolah (RLS) Tahun 2024 ..... 41
3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun ini denganTarget Akhir Renstra (Tahun 2024)..... 42
3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun ini denganTarget Akhir Renstra (Tahun 2024)..... 42
3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 44
3.10 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja APK ..... 45
3.11 APK SM sederajat Tahun 2024..... 46
3.12 Realisasi Kinerja APK SM sederajat tahun ini denganTarget Akhir Renstra (Tahun 2024)..... 47
3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja APK SM sederajat Tahun ini Dengan Nasional..... 48
3.14 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja APM SM Sederajat ..... 48
3.15 APM SM sederajat Tahun 2024 ..... 49

3.16 Realisasi Kinerja APM SM sederajat tahun ini denganTarget Akhir Renstra (Tahun 2024)..... 50
3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja APM SM sederajat Tahun ini Dengan Nasional..... 50
3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 53
3.19 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A ..... 55
3.20 Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A Tahun 2024..... 56
3.21 Realisasi Kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A Tahun ini denganTarget Akhir Renstra (Tahun 2024)..... 56
3.22 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 58
3.23 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau..... 62
3.24 Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024 ..... 63
3.25 Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun ini denganTarget Akhir Renstra (Tahun 2024)..... 63
3.26 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 48
3.27 Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran ..... 67
4.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... 69

# DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau ..... 22

# DAFTAR GRAFIK

1.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan ..... 24
1.2 Klasifikasi ASN Menurut Pendidikan..... 25

# DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Sekretaris Daerah Nomor Kpts. 159/IV/2023 tentang Pedoman Pengumpulan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Provinsi Riau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam rangka pemenuhan dari ketentuan perundang- undangan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Riau disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25).
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 4).
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024 adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2024.
3. Sebagai informasi atas implementasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
4. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang.
5. Sebagai bukti akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan lain atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran

## 1.4 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7).

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah serta pelaksanaan urusan dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan dana alokasi khusus yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah 20Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat menyelenggarakan tugas mengkoordinasikan penyusunan, merencanakan, mengendalikan kebijakan dan melaksanakan pelayanan teknis administrative.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Dinas, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
- pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pada Sekretariat;
- pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan;
- mengkoordinasikan perumusan, pengkajian bahan saran pertimbangan bidang Pendidikan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- mengkoordinasikan penyusunan, merencanakan, dan pelaksanaan Urusan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus;
- mengkoordinasikan pengendalian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
- mengkoordinasikan pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas;
- mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Dinas;
- mengkoordinasikan pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Pendidikan Khusus;
- mengkoordinasikan manajemen, pengkajian, pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan data pokok Pendidikan serta pengembangan sistem informasi Pendidikan;
- mengkoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis penyelenggaraan pembiayaan pengelolaan Pendidikan;

- mengkoordinasikan pengkajian, penyiapan, penyusunan, pengusulan dan pengumpulan dokumen Rencana Strategis (RenStra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Penja serta Rencana Aksi), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ PD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Inovasi PD;
- pengkajian verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pendidikan;
- mengkoordinasikan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisa realisasi pelaksanaan program/kegiatan pada Perangkat Daerah;
- mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan baik Sekretariat, Bidang, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Satuan Pendidikan;
- memfasilitasi penyelesaian masalah hukum di lingkungan Dinas, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan pengembangan Kerjasama, penyiapan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;

- penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum, administrasi keuangan, perlengkapan, pengelolaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- penyelenggaraan, pengelolaan dan menyediakan layanan administratif urusan rumah tangga di lingkungan Dinas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Subbagian Kepegawaian dan Umum Mempunyai Tugas :
   - membantu dan mewakili Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepegawaian dan Umum serta antar Instansi Pemerintah;
   - melaksanakan perumusan bahan saran pertimbangan mengenai Kepegawaian dan Umum sebagai bahan penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
   - melaksanakan penyusunan, pembahasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan;
   - mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan validasi dan pemutakhiran data kepegawaian di lingkungan Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
   - melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan di lingkup Kepegawaian dan Umum;
   - melaksanakan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup Kepegawaian dan Umum;
   - mengkoordinasikan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, penyelesaian masalah hukum kepegawaian, dan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan pengembangan Kerjasama, penyiapan bahan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;

- penyelenggaraan pemberian penghargaan dan cinderamata peserta didik berprestasi akademik dan non akademik;
- melaksanakan penerimaan, dan pendistribusian surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara bagi pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan;
- penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan pendataan dan penataan pendistribusian, mutasi, promosi, guru dan tenaga kependidikan, penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI), Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta urusan kepegawaian lainnya;
- menyiapkan kebutuhan bahan pelaksanaan, penyelenggaraan administrasi urusan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
- penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas :
   - membantu dan mewakili Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta antar Instasi Pemerintah;
   - pelaksanaan perumusan bahan saran pertimbangan mengenai Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;

- penyusunan, pembahasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan, pemeriksaan, merapatkan realisasi capaian kinerja dan anggaran Dinas, Cabang serta menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan di lingkungan Dinas;
- penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pendidikan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- penyelenggaraan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- penyelenggaraan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- pengkajian dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- pelaksanaan penyusunan laporan hasil verifikasi dan pembukuan keuangan;
- penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan pengelolaan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;
- pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Eguitas (LPE), neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- pelaksanaan dan penyiapan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan, pegawai setiap bulannya dan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);

- pelaksanaan dan penyiapan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas.

8. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
   a. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Sekolah Menengah Atas.
   b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:
      - membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
      - mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
      - pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
      - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
      - perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
      - pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi

capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

- penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan dan peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyelenggaraan kebijakan peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan

Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

- penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan serta pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkupan jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

a. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:

- membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
- mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan dan peserta pendidik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyusunan perumusan kebijakan, peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis pembiayaan pengelolaan

Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan kebijakan peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan dunia usaha/dunia industri di sekolah pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Penyelenggaraan kegiatan bina karakter dan Pendidikan Vokasi serta revitalisasi di era industri pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

a. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus menyelenggarakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan layanan inklusif, Pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, tidak mampu dari segi sosial ekonomi.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instasi Pemerintah;

- mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan kebijakan, peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik

bidang pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan layanan inklusif, Pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan, peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan asesmen autis, terapi serta transisi untuk persiapan mengikuti pendidkan inklusif di sekolah regular;
- penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

- pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. -14- 9. Ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah

11. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

a. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan operasional pembinaan dan peningkatan karir, peningkatan mutu dan profesionalisme, pemberian penghargaan, pelayanan perlindungan profesi serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi;

- membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instasi Pemerintah;
- mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;

- pelaksanaan kebijakan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- peningkatan mutu serta karakter pendidik;
- perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, peningkatan mutu dan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan;
- penyusunan dan penyelenggaraan Pendidikan berbasis muatan lokal budaya melayu Riau baik Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan dan pelaksanaan pembinaan serta peningkatan karir Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi dan assesment Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

- penyusunan perumusan dan pelaksanaan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyusunan perumusan dan pelaksanaan pemberian penghargaan serta memberikan pelayanan perlindungan profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan organisasi profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsi.

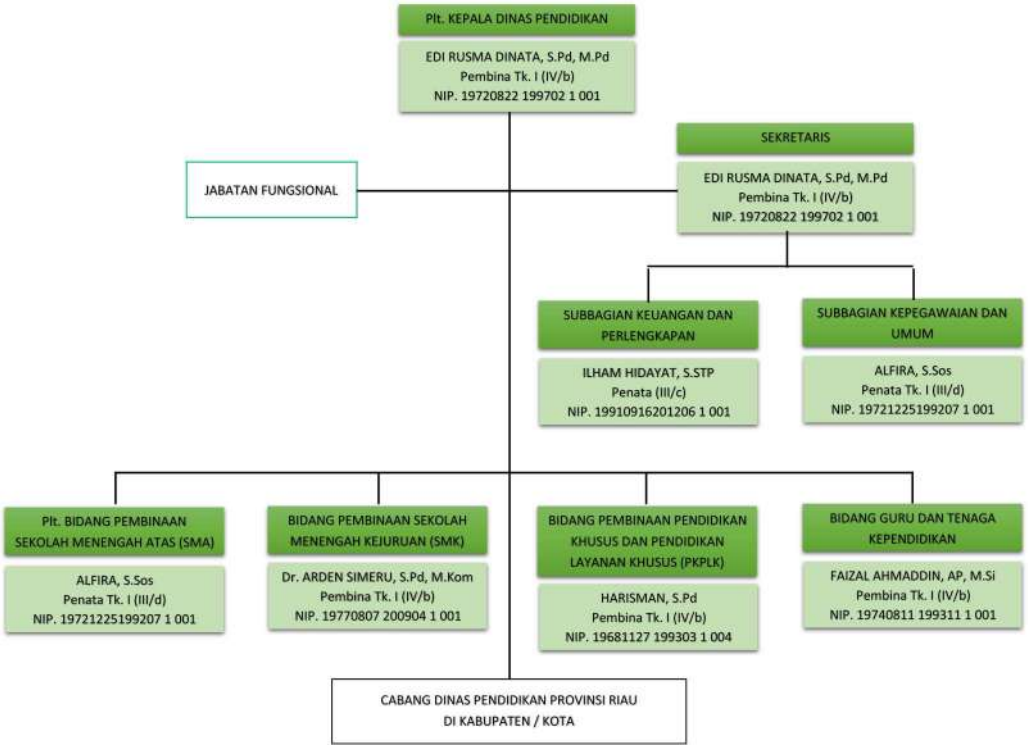
## 1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 21) terdiri atas:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    2. Sub bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA).
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK).
f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**




## 1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

### 1.6.1 Eksternal

Aspek strategis eksternal Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat mencakup berbagai faktor yang berada di luar organisasi namun dapat mempengaruhi kinerja dan pengambilan keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Tantangan aspek strategis eksternal Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah

   Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan pendidikan, seperti kurikulum, anggaran, dan standar pendidikan.

2. Perkembangan Teknologi

   Perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi cara belajar dan mengajar, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pendidikan.

3. Kebutuhan Masyarakat

   Kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri dan ekonomi.

4. Kerjasama dengan Stakeholder

   Kerjasama dengan stakeholder seperti orang tua, masyarakat, industri, dan lembaga pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

5. Perubahan Sosial dan Ekonomi

   Perubahan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan harapan masyarakat akan pendidikan.

6. Regulasi dan Standar

   Regulasi dan standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan internasional.

Dinas pendidikan Provinsi Riau dalam menghadapi aspek strategis eksternal dapat membantu :

1. Mengantisipasi perubahan dan tantangan yang mungkin dihadapi.
2. Mengembangkan strategi yang relevan dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dan masyarakat.
4. Mengoptimalkan sumber daya dan anggaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

### 1.6.2 Internal

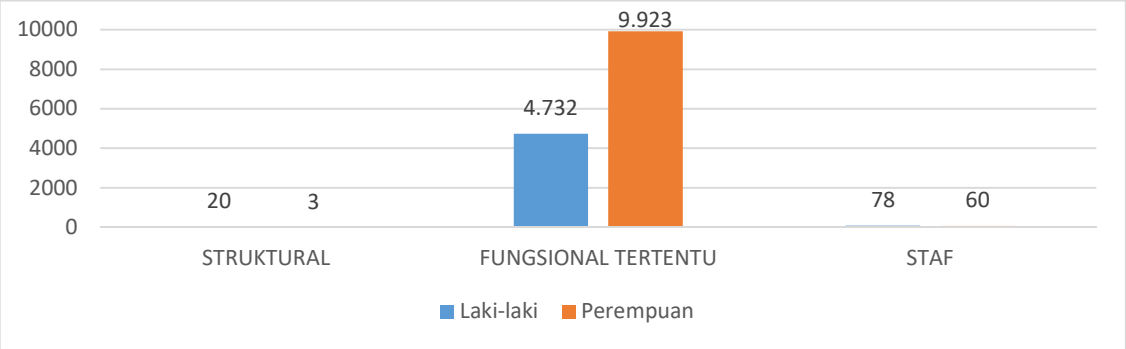
#### 1.6.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Sumber daya manusia/personil di Dinas Pendidikan terdiri dari 14.816 Pegawai termasuk guru dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**
**Kondisi ASN berdasarkan Jabatan**

| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH ASN BERDASARKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STRUKTURAL | | | | JUMLAH | FUNGSIONAL TERTENTU | STAF | JUMLAH |
| | | I | II | III | IV | | | | |
| 1 | Laki-laki | 0 | 1 | 8 | 11 | 20 | 4.732 | 78 | 4.830 |
| 2 | Perempuan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.923 | 60 | 9.986 |
| **TOTAL ASN** | | | | | | **23** | **14.655** | **138** | **14.816** |

**Grafik 1.1**
**Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan**



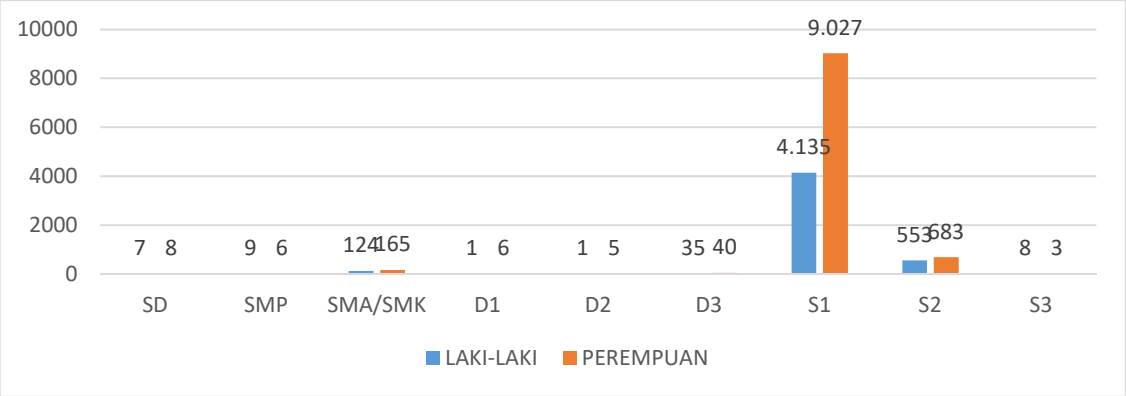

sumber data : (Dinas Pendidikan Provinsi Riau )

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diketahui bahwa ASN pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau didominasi oleh jabatan fungsional tertentu yaitu guru dan pengawas sebanyak 14.655 orang, dan Jabatan Struktural sebanyak 23 orang.

**Tabel 1.2**
**Klasifikasi ASN menurut Pendidikan**

| JENIS KELAMIN | JUMLAH ASN BERDASARKAN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TINGKAT PENDIDIKAN | | | | | | | | | |
| | SD | SMP | SMA/SMK | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
| **LAKI-LAKI** | 7 | 9 | 124 | 1 | 1 | 35 | 4.135 | 553 | 8 | 4.873 |
| **PEREMPUAN** | 8 | 6 | 165 | 6 | 5 | 40 | 9.027 | 683 | 3 | 9.943 |
| **TOTAL** | **15** | **15** | **289** | **7** | **6** | **75** | **13.162** | **1.236** | **11** | **14.816** |

**Grafik 1.2**
**Klasifikasi ASN Menurut Pendidikan**




(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Dari data pada tabel 1.2 diketahui bahwa pendidikan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 (S.1) yang berjumlah 13.162 orang dan SMA/SMK Sederajat berjumlah 289 orang. Jika dilihat dari ASN yang memiliki tingkat pendidikan S2 dan S3 adalah sebanyak 1.247 orang dari seluruh ASN Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah cukup baik.

1.6.2.2 Sarana dan Prasarana

1) Aset Tanah / Sarana Prasarana

Rekapitulasi Aset/Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**
**Rekapitulasi Aset/Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

| NO | Jenis Barang/ Nama Barang | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak/ Alamat | Penggunaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain | 2.732 | 1982 | JL. Hangtuah Kel. Suka Mulya Kec. Sail Pekanbaru | - |
| 2 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I | 600 | 2009 | Jl. Cemara Pekanbaru | - |
| 3 | Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama | 1.174 | 1982 | Jl. Sultan Syarif Qasim Pekanbaru | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama | 21.680 | 1964 | Jl. Cendrawasih Dumai | SMKN Perikanan Provinsi Riau |
| 5 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1.550 | 1982 | Jl. Suka Terus | Gedung Graha / Mes Wisma Handayani |
| 6 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 8.360 | 1999 | Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru | Dinas Pendidikan |
| 7 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 4.021 | 1999 | Jl. Dr. Sutomo Pekanbaru | BPG |
| 8 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 4.740 | 2009 | Jl. Sukaterus No. 3 Pekanbaru | BTP dan BPKB |
| 9 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 6.305 | 1995 | Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga Pekanbaru | Gedung Guru |
| 10 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | - | 1963 | JL. Kubang Raya | SMAN Plus |
| 11 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | 14.345 | 1963 | JL. Segar rejosari kec. Tenayan raya | SLB |
| 12 | Tanah Lapangan Tenis | 2.730 | 1982 | Jl. Suka Terus Kec. Jadirejo Sukajadi Pekanbaru | SMA Handayani |
| 13 | Tanah kosong yang sudah diperuntukkan | - | 2007 | Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru | Gedung Autis |
| 14 | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | 3.385 | 2004 | Kel. Wonorejo Pekanbaru Kec. Marpoyan Damai | Gedung Sekolah SMP |
| 15 | Tanah Lapangan Tenis | 1.480 | 1963 | JL. DR. Sutomo | Lapangan Tenis |
| 16 | Tanah Kosong Lainnya | 2.370 | 1977 | JL. DR. Sutomo | |

*sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2022*

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa Aset Tanah Dinas Pendidikan Provinsi Riau ada 16 lokasi dari aset tersebut yang memiliki Luar terbesar adalah Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama dengan Luas 21.680 ($M^2$) dan yang terkecil Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I dengan Luas 600 ($M^2$). Sedangkan aset dengan tahun pengadaan terlama yaitu Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) di Jln. Kubang Raya dan Jln. Segar Rejosari Kec. Tenayan Raya serta Tanah Lapangan Tenis di Jln. Dr. Sutomo Pekanbaru.

2) Prasarana / Barang

Rekapitulasi Aset Jumlah Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 1.4**
**Rekapitulasi Aset Jumlah Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau**
**Tahun 2021**

| No. | Nama Barang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Mobil Operational Avanza | 5 |
| 2 | Mobil Operational Mini Bus | 2 |
| 3 | Mobil Operational Nissan / Double Cabin | 7 |
| 4 | Mobil Operational L 300 | 1 |
| 5 | AC | 558 |
| 6 | Alat Labor | 238 |
| 7 | Alat Labor SMA | 3957 |
| 8 | Amplifire | 51 |
| 9 | Alat Peraga SLB | 75 |
| 10 | Alat Peraga SMK | 654 |
| 11 | CCTV | 64 |
| 12 | Fotocopy | 21 |
| 13 | Freezer | 5 |
| 14 | Genset | 41 |
| 15 | External Hardisk | 45 |
| 16 | Dispenser | 106 |
| 17 | DVR CCTV | 12 |
| 18 | Finger Print | 77 |
| 19 | Infokus / Proyektor | 926 |
| 20 | Kamera | 97 |
| 21 | Kipas Angin | 450 |
| 22 | Komputer Server | 308 |
| 23 | PC | 2094 |
| 24 | UPS | 740 |
| 25 | Stabilizer | 569 |
| 26 | Printer | 1712 |
| 27 | HUB | 64 |
| 28 | Kulkas | 30 |
| 29 | Laptop | 932 |
| 30 | Note Book | 814 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 | Scanner | 52 |
| 32 | Router | 195 |
| 33 | Modem | 15 |
| 34 | Monitor | 155 |
| 35 | Handycam | 15 |
| 36 | GPS | 7 |
| 37 | Mesin Potong Kertas | 30 |
| 38 | Mesin Potong Rumput | 79 |
| 39 | Switch Jaringan | 209 |
| 40 | Vacum Cleaner | 43 |
| 41 | Vacum Packing Machine | 7 |
| 42 | Radio HT | 43 |
| 43 | Mesin Bordir | 275 |
| 44 | Mesin Jahit | 307 |
| 45 | Mesin Obras | 176 |
| 46 | Mesin Fax | 6 |
| 47 | Mesin Bor | 33 |
| 48 | Mesin Kompresor | 42 |
| 49 | Pompa Air | 125 |
| 50 | Mixer Sound | 24 |
| 51 | Racun Api | 115 |
| 52 | Pena Pintar | 24 |
| 53 | Meat Grinder | 8 |
| 54 | Meat Slicer | 7 |
| 55 | Meja Guru | 417 |
| 56 | Meja Siswa | 2658 |
| 57 | Kursi Guru | 445 |
| 58 | Kursi Siswa | 2433 |
| 59 | Kursi Staf | 278 |
| 60 | Meja Staf | 156 |
| 61 | Kursi Kepala Sekolah | 26 |
| 62 | Kursi Wakil Kepala Sekolah | 1 |
| 63 | Meja Kepala Sekolah | 18 |
| 64 | Meja Wakil Kepala Sekolah | 8 |
| 65 | Filling Kabinet | 216 |
| 66 | Brangkas | 18 |
| 67 | Sofa | 75 |
| 68 | Lemari | 489 |
| 69 | Lemari Arsip | 297 |
| 70 | Rak Buku | 108 |

| | | |
|---|---|---|
| 71 | Sensor Cahaya | 7 |
| 72 | Sensor for Green House | 6 |
| 73 | Sensor Kelembapan | 6 |
| 74 | Sensor Konduktivitas | 6 |
| 75 | Sensor Pendeteksi Gas | 9 |
| 76 | Sensor PH | 9 |
| 77 | Sensor Temperatur | 10 |
| 78 | Sensor Ultra Violet | 6 |
| 79 | Sensor Warna | 3 |
| 80 | Soil Hardness Meter | 18 |
| 81 | Soil Nutrient Analyzer | 18 |
| 82 | Soil Tensiometer | 18 |
| 83 | Soil Water Potential Locator | 17 |
| 84 | Fortigate | 1 |
| 85 | Greenhouse With Fogging and | 6 |
| 86 | Drone | 2 |
| 87 | Plant Nutrition Analyzer | 20 |
| 88 | Portable Leaf Area Meter | 4 |

*sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2022*

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa Aset Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau ada 88 jenis barang dari aset tersebut terbanyak adalah Alat Labor SMA yang berjumlah 3.957 buah.

3) Aset Satuan Pendidikan

Rekapitulasi Asset Jumlah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1.5**
**Rekapitulasi Aset Jumlah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

| NO | KABUPATEN/KOTA | SMA | | | SMK | | | SLB | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML |
| 1 | Kab. Bengkalis | 34 | 14 | 48 | 15 | 11 | 26 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Kab. Indragiri Hilir | 38 | 26 | 64 | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 29 | 6 | 35 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kab. Kampar | 42 | 11 | 53 | 13 | 20 | 33 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Kab. Kepulauan Meranti | 17 | 7 | 24 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Kuantan Singingi | 21 | 0 | 21 | 12 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kab. Pelalawan | 20 | 7 | 27 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Kab. Rokan hilir | 38 | 26 | 64 | 6 | 21 | 27 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Kab. Rokan Hulu | 29 | 6 | 35 | 23 | 16 | 39 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Kab. Siak | 32 | 4 | 36 | 12 | 14 | 26 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Kota Dumai | 7 | 8 | 15 | 7 | 10 | 17 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Kota Pekanbaru | 18 | 45 | 63 | 10 | 54 | 64 | 1 | 14 | 15 |
| **JUMLAH** | | 303 | 156 | 459 | 128 | 179 | 307 | 17 | 17 | 30 |

*Sumber : Dapodikdasmen Tahun 2021/2022 (dapo.kemdikbud.go.id)*

Data tabel tersebut terlihat jumlah Sekolah SMA Terbanyak ada di Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir sejumlah 64 Sekolah diikuti Kota Pekanbaru sejumlah 63 Sekolah. Jumlah SMK terbanyak ada di Kota Pekanbaru sejumlah 64 Sekolah di ikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu 39 Sekolah.

## 1.7 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang ditemukan tentu perlu menjadi bahan antisipasi agar dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan hingga akhir periode Renstra Dinas Pendidikan dapat menjadi lebih baik. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Pendidikan terdapat pada table 1.3 sebagai berikut :

## Tabel 1.6
## Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1. | Belum meratanya akses pendidikan | Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan | Masih terbatasnya daya tampung pendidikan menengah dan layanan khusus |
| | | | Masih rendahnya kualitas ruang kelas |
| | | Masih terdapat calon peserta didik/ peserta didik yang sulit menjangkau akses layanan pendidikan | Masih terbatasnya pembiayaan operasional sekolah yang dianggap memberatkan peserta didik |
| | | | Masih terdapat daerah yang secara teknis belum dapat didirikan sekolah menengah |
| 2. | Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan | Masih rendahnya kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik | Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan |
| | | | Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. |
| | | | Belum optimalnya pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik |
| | | Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan | Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan menengah |
| | | | Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan khusus |
| | | Belum Optimalnya Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan | Belum optimalnya kerjasama pendidikan kejuruan dengan Dunia Usaha Dunia Industri |
| | | | Masih rendahnya manajemen sekolah berbasis vokasi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Masih belum terpenuhinya sarana prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri |

## 1.8 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

Pada tahun 2024 telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

Hasil dari evaluasi AKIP untuk Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan nilai sebesar **74,60** dan Tingkat akuntabilitas kinerja "**BB**". namun demikian ada beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala.
2. Agar pada pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Dari hal tersebut maka Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP, sebagai berikut:

1. Telah Melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala.
2. Dalam upaya memotivasi dalam meningkatkan kinerja individu bagi ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau maka Hasil pengukuran Kinerja Individu telah dijadikan penilaian dalam pemberian reward/punishment.

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

Dengan adanya perencanaan kinerja ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas dan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan kinerja dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Pemerintah Provinsi Riau mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa menyebutkan manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah Kabupaten/Kota hanya menangani Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sehingga Pemerintah Provinsi Riau merubah RPJMD dan mengacu pada perubahan RPJMD, Dinas Pendidikan membuat Renstra untuk Periode Tahun 2019-2024.

## 2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau antara lain:

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan misi Kepala Daerah, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2019-2024 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran- ukuran terlaksananya misi Kepala Daerah.

1.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis Dinas Pendidikan tahun 2019-2024 adalah Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.

Adapun Indikator program Sasaran/kinerja adalah sebagai berikut :

- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
- Harapan Lama Sekolah (tahun)

1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Riau (2019-2024)

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan

   Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikut:

   1) APK SM Sederajat
   2) APM SM Sederajat

2. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan.

   Adapun Indikator Sasaran/ kinerja adalah sebagai berikut :

   - Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A

3. Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau

   Adapun Indikator Sasaran/ kinerja adalah sebagai berikut :

   - Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau

**Tabel 2.1**
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**
**Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

| No | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 1 | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | 1 | Rata-rata Lama Sekolah | 9.14 | 9,19 | 9.24-9.30 | 9.29-9.35 | 9.35-9.40 |
| | | | | 2 | Harapan Lama Sekolah | 13,20 | 13,28 | 13.37 - 13.47 | 13.44 - 13.53 | 13.44 - 13.60 |
| | | 2 | Meningkatnya Pemerataan | 1 | APK SM Sederajat | 84,61 | 88,90 | 90,40 | 91,90 | 92,40 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Akses Pendidikan | 2 | APM SM Sederajat | 64,01 | 4,00 | 66,36 | 67,88 | 68,00 |
| | | | | 3 | Angka Putus Sekolah SM Sederajat | 0,76 | 0,94 | 0,74 | 0,73 | 0,70 |
| | | 3 | Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan | Persentase SMA dan SMK yang Berakreditasi A | | 93,32 | 93,71 | 94,12 | 94,52 | 94,92 |
| | | | | Persentase SMA dan SMK yang Berakreditasi A | | | | | 44,94 | |
| | | 4 | Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | | | | | 74 | |

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan tahun 2019-2024 dan sumber daya anggaran (murni) yang ada, Dinas Pendidikan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/ kegagalannya pada akhir periode.

Isi dari perjanjian kinerja tahun 2024 Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.2

## Tabel 2.2
## Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | 1. | Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur >25 Tahun | 9,35-9,40 |
| | | 2. | Harapan Lama Sekolah | 13,44-13,60 |
| 2 | Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan | 1. | APK SM Sederajat | 92,40 |
| | | 2. | APM SM Sederajat | 68,00 |
| 3 | Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan | Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A | | 44,98 |
| 4 | Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | | 74,50 |
| | | | | |
| **No** | **Program** | **Anggaran** | | **Keterangan** |
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Rp. | 1.260.878.467.343 | APBD |
| 2 | Program Pengelolaan Pendidikan | Rp. | 1.260.878.467.343 | APBD |
| 3 | Program Pengembangan Kurikulum | Rp. | 251.851.915 | APBD |
| 4 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp. | 34.865.221.835 | APBD |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. | 1.260.878.467.343 | APBD |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis dengan jumlah 6 (enam) Indikator Sasaran sebagai berikut :

### 1. SASARAN 1 : MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2024 dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah ( HLS) yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pendidikan suatu daerah. Capaian sasaran perindikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dengan rumus sebagai berikut dihitung berdasarkan rumus :

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Keterangan:

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.1**
**Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja**
**Rata-Rata Lama Sekolah**

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | Rata-Rata Lama Sekolah | 9,35-9,40 | 9,43 | 100,32 | -9,29 9,35 | 9,32 | 99,68 |

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat pada Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Pada Tahun 2024 adalah sebesar 100,32 persen dengan realisasi 9,43 dari target 9,40 sedangkan capaian pada Tahun 2023 adalah sebesar 99,68 persen dengan realisasi 9,32 dengan target 9,32. Capaian Indikator sasaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,64 persen dibandingkan dengan Capaian Tahun 2023. Berikut tabel realisasi indikator Rata-Rata Lama Sekolah pada Tahun 2024 :

**Tabel 3.2**
**Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota | [Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Kuantan Singingi | 9,14 |
| 2 | Indragiri Hulu | 8,43 |
| 3 | Indragiri Hilir | 7,32 |
| 4 | Pelalawan | 8,96 |
| 5 | Siak | 9,92 |
| 6 | Kampar | 9,58 |
| 7 | Rokan Hulu | 8,94 |
| 8 | Bengkalis | 9,74 |
| 9 | Rokan Hilir | 8,53 |
| 10 | Kepulauan Meranti | 8,12 |

| No | Kabupaten/Kota | [Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 |
|---|---|---|
| 11 | Pekanbaru | 11,96 |
| 12 | Dumai | 10,29 |
| RIAU | | 9,43 |

**sumber data : BPS Provinsi Riau**

Dari tabel 3.2 dapat dilihat Realisasi RLS pada tahun 2024 adalah 9.43 yang artinya penduduk usia 25 tahun keatas telah menamatkan sekolah tingkat SMP atau menduduki SMA tahun pertama (kelas 10).

Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah tahun ini dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2024) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**
**Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah tahun ini dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2024)**

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun Akhir Renstra (2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | Rata-Rata Lama Sekolah | -9,35<br>9,40 | 9,43 | 100,32 | -9,35<br>9,40 | 9,43 | 100,32 |

Dari tabel 3.3 dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun ini dengan Target Akhir Tahun Renstra adalah sama karena tahun 2024 merupakan tahun akhir masa Renstra Tahun 2019-2024.

Membandingkan realisasi kinerja Rata-Rata Lama Sekolah tahun ini dengan Standar Nasional pada tahun 2024 adalah :

**Tabel 3.4**
**Perbandingan Realisasi Kinerja**
**Rata-Rata Lama Sekolah tahun ini Dengan Nasional**

| Uraian | Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 |
|---|---|
| **Provinsi Riau** | 9,43 |
| **Nasional (Indonesia)** | 8,85 |

Sumber data : BPS Indonesia

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun ini dengan Nasional, capaian Provinsi Riau lebih tinggi sebesar 9,43 sedang rata-rata nasional capaiannya lebih rendah 0,58 poin yaitu sebesar 8,85.

### 1.2 Harapan Lama Sekolah

Indikator Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, Sumber Data BPS dengan rumus sebagai berikut :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dengan indikator Harapan Lama Sekolah sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.5**
**Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah**

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah | 13,44-13,60 | 13,42 | 99,85 | 13,44-13,50 | 13,30 | 98,30 |

Dari tabel 3.5 dapat dilihat bahwa Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat pada Indikator Harapan Lama Sekolah Pada Tahun 2024 adalah sebesar 99,85 persen dengan realisasi 13,42 dari target 13,44 sedangkan

capaian pada Tahun 2023 adalah sebesar 98,30 persen dengan realisasi 13,30 dengan target 13,44. Capaian Indikator sasaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,55 persen dibandingkan dengan Capaian Tahun 2023. Berikut tabel realisasi indikator Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2024 :

**Tabel 3.6**
**Harapan Lama Sekolah (RLS) Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota | [Metode Baru] Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Kuantan Singingi | 13,38 |
| 2 | Indragiri Hulu | 12,6 |
| 3 | Indragiri Hilir | 12,21 |
| 4 | Pelalawan | 12,91 |
| 5 | Siak | 12,89 |
| 6 | Kampar | 13,61 |
| 7 | Rokan Hulu | 12,94 |
| 8 | Bengkalis | 13,44 |
| 9 | Rokan Hilir | 12,89 |
| 10 | Kepulauan Meranti | 12,87 |
| 11 | Pekanbaru | 15,84 |
| 12 | Dumai | 13,35 |
| | **RIAU** | **13,42** |

Sumber data : BPS Provinsi Riau

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 adalah 13,42 yang artinya berarti anak-anak usia 7 tahun berpeluang tamat diploma I atau mengecap pendidikan hingga perguruan Tinggi tingkat pertama. Data tersebut memperlihatkan bahwa ada peluang bersekolah sampai perguruan tinggi, tetapi kenyataannya banyak yang putus sekolah sampai SMP atau tidak melanjutkan ke jenjang SMA sederajat.

Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah tahun ini dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2024) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**
**Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah tahun ini denganTarget Akhir Renstra (Tahun 2024)**

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun Akhir Renstra (2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah | 13,44-13,60 | 13,42 | 99,85 | 13,44-13,60 | 13,42 | 99,85 |

Dari tabel 3.7 dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun ini dengan Target Akhir Tahun Renstra adalah sama karena tahun 2024 merupakan tahun Harapan Lama Sekolah tahun ini dengan Standar Nasional pada tahun 2024 adalah :

**Tabel 3.8**
**Perbandingan Realisasi Kinerja**
**Rata-Rata Lama Sekolah tahun ini Dengan Nasional**

| Uraian | Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 |
|---|---|
| **Provinsi Riau** | 13,42 |
| **Nasional (Indonesia)** | 13,21 |

Sumber data : BPS Indonesia

Dari tabel 3.8 dapat dilihat bahwa Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun ini dengan Nasional, capaian Provinsi Riau lebih tinggi sebesar 13,42 sedang rata-rata nasional capaiannya lebih rendah 0,21 poin yaitu sebesar 13,21.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat sebagai berikut :

a. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Meningkatkan infrastruktur pembangunan secara merata (jalan dan jembatan) di Provinsi Riau dan meningkatkan koordinasi dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kota untuk peningkatan akses ke sekolah, Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk pemenuhan Akses Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan, Peningkatan Mutu/Kualitas Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Riau
    1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah dan tidak pernah sekolah serta Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah
    2. Kurangnya minat masyarakat mengikuti Pendidikan Kesetaraan
    3. Akses Pendidikan bagi masyarakat yang jauh atau belum terpenuhi
    4. Tingginya biaya Pendidikan
c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Riau.
    1. Peningkatan Kualitas Pembangunan bidang pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran yang produktif
    2. Meningkatkan Daya Tampung Sekolah melalui Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) serta merehabilitasi ruang kelas yang rusak.
    3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan untuk Sosialisasi dan peningkatan Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B,C) yang merupakan kewenangan dari Pemkab/Pemkot.
    4. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB)
    5. Memberikan Beasiswa Siswa SMA sederajat untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan mengurangi biaya personal siswa dengan Pemberian Bantuan Biaya Personal ke Lembaga

Pendidikan SMA, SMK dan SLB melalui Dana BOSDA serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

6. Meningkatkan ketersediaan data Pendidikan yang akurat dan berkualitas.
7. Meningkatkan peran serta stakeholders pada pembangunan bidang pendidikan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap pencapaian kinerja sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dan indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.9**
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | Rata-Rata Lama Sekolah | 100,32 | 86,76 | 13,56 |
| | Harapan Lama Sekolah | 99,85 | | 13,09 |

Dari tabel 3.9 di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat cukup baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 100,32% dapat tercapai dengan serapan anggaran 86,76% dengan tingkat efisiensi mencapai 13,56% sedangkan untuk capaian kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah sebesar 99,85% dapat tercapai dengan serapan anggaran 86,76% dengan tingkat efisiensi mencapai 13,09%. Adapun analisis efisiensi serapan anggaran tahun 2024 terdapat permasalahan keuangan daerah yang mengakibatkan beberapa sub kegiatan mengalami tunda bayar dan akan di bayarkan pada tahun 2025.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK)
3. Pengelolaan Pendidikan Khusus

Dampak kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat terhadap masyarakat adalah meningkatnya masyarakat yang dapat bersekolah dan lulus di jenjang pendidikan SMA sederajat serta melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi serta dapat bekerja setelah menamatkan Sekolah Kejuruan/Vokasi.

## 2. SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKSES PENDIDIKAN

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan Tahun 2024 dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dalam meningkatkan akses Pendidikan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Riau untuk dapat belajar sepanjang hayat. Capaian sasaran per indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Sederajat

Indikator APK SM sederajat dapat digunakan untuk ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah siswa keseluruhan SM Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 } - \text{18 Tahun}} X\ 100\%$$

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan dengan indikator APK sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**
**Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja APK**

| YN | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya Akses Pendidikan | APK SM Sederajat | 92,40 | 92,10 | 99,68 | 91,90 | 90,44 | 98,41 |

Dari tabel 3.10 dapat dilihat bahwa Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan pada Indikator APK SM sederajat pada Tahun 2024 adalah sebesar 99,68 persen dengan realisasi 92,10 dari target 92,40 sedangkan capaian pada Tahun 2023 adalah sebesar 98,41 persen dengan realisasi 90,44 dengan target 91,90. Capaian Indikator sasaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,26 persen dibandingkan dengan Capaian Tahun 2023. Berikut tabel realisasi indikator APK SM sederajat pada Tahun 2024:

**Tabel 3.11**
**APK SM sederajat Tahun 2024**

| No | Kab/Kota | Jumlah Penduduk 16-18 Tahun | Jumlah siswa keseluruhan | APK % |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Kab. Kampar | 47.301 | 41.212 | 87,13 |
| **2** | Kab. Bengkalis | 37.856 | 33.508 | 88,51 |
| **3** | Kab. Indragiri Hulu | 23.292 | 22.592 | 96,99 |
| **4** | Kab. Indragiri Hilir | 41.310 | 30.106 | 72,88 |
| **5** | Kab. Pelalawan | 19.851 | 18.615 | 93,77 |
| **6** | Kab. Rokan Hulu | 28.742 | 28.756 | 100,05 |
| **7** | Kab. Rokan Hilir | 45.783 | 35.413 | 77,35 |
| **8** | Kab. Siak | 26.107 | 26.522 | 101,59 |
| **9** | Kab. Kuantan Singingi | 16.803 | 15.863 | 94,41 |
| **10** | Kab. Kepulauan Meranti | 10.978 | 8.435 | 76,84 |
| **11** | Kota Pekanbaru | 62.932 | 69.149 | 109,88 |
| **12** | Kota Dumai | 16.395 | 17.354 | 105,85 |
| | **Provinsi Riau** | **377.350** | **347.525** | **92,10** |

Sumber data : Buku APK APM Kemendikbudristek

Dari tabel 3.11 tersebut menunjukkan ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang capaian APK berada dibawah rata-rata APK Provinsi, yaitu Kabupaten Kampar (87,11%), Kabupaten Bengkalis (88,51%), Kabupaten Indragiri Hilir (72,88%), Kabupaten Rokan Hilir (77,35%) dan Kabupaten Kep. Meranti (76,84%) dengan capaian terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan capaian tertinggi adalah Kota Pekanbaru (109,88%). Dengan demikian intervensi pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai sasaran strategis pemerataan dan akses layanan pendidikan menengah yang seharusnya mendapat prioritas utama terhadap program dan kegiatan adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir,Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Kampar terutama untuk Sekolah jarak jauh.

Perbandingan Realisasi Kinerja APK SM sederajat tahun ini dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2024) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.12**
**Realisasi Kinerja APK SM sederajat tahun ini denganTarget Akhir Renstra (Tahun 2024)**

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun Akhir Renstra (2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya Akses Pendidikan | APK SM Sederajat | 92,40 | 92,10 | 99,68 | 91,90 | 90,44 | 98,41 |

Dari tabel 3.12 dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja APK SM sederajat Tahun ini dengan Target Akhir Tahun Renstra adalah sama karena tahun 2024 merupakan tahun terakhir Renstra 20219-2024. APK SM sederajat tahun ini dengan Standar Nasional pada tahun 2024 adalah:

**Tabel 3.13**
**Perbandingan Realisasi Kinerja**
**APK SM sederajat tahun ini Dengan Nasional**

| Uraian | APK SM sederajat Tahun 2024 |
|---|---|
| **Provinsi Riau** | 92,10 |
| **Nasional (Indonesia)** | 99,20 |

Sumber data : Buku APK APM Indonesia

Dari tabel 3.13 dapat dilihat bahwa Perbandingan Realisasi Kinerja APK SM sederajat Tahun ini dengan Nasional, capaian Provinsi Riau lebih rendah sebesar 99,20 persen sedang rata-rata nasional capaiannya lebih tinggi 7,10 poin yaitu sebesar 92,10. Hal ini membuat Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus lebih mengupayakan peningkatan APK SM Sederajat untuk meningkatkan daya tampung melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

### 2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SM Sederajat

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM dapat dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah murid umur 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat SM sederajat}}{\text{jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\%$$

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan dengan indikator APM SM sederajat sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.14**
**Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja APM SM Sederajat**

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya Akses Pendidikan | APM SM Sederajat | 68,00 | 68,17 | 100,25 | 67,88 | 66,43 | 97,86 |

Dari tabel 3.14 dapat dilihat bahwa Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan pada Indikator APM SM sederajat pada Tahun 2024 adalah sebesar 100,25 persen dengan realisasi 68,17 dari target 68,00 sedangkan capaian pada Tahun 2023 adalah sebesar 97,86 persen dengan realisasi 66,43 dengan target 67,88. Capaian Indikator sasaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,39 persen dibandingkan dengan Capaian Tahun 2023. Berikut tabel realisasi indikator APM SM sederajat pada Tahun 2024:

**Tabel 3.15**
**APM SM sederajat Tahun 2024**

| No | Kab/Kota | Jumlah Penduduk 16-18 Tahun | Jumlah siswa Usia 16-18 Tahun | APM % |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Kab. Kampar | 47.301 | 31.288 | 66,15 |
| **2** | Kab. Bengkalis | 37.856 | 24.409 | 64,48 |
| **3** | Kab. Indragiri Hulu | 23.292 | 16.628 | 71,39 |
| **4** | Kab. Indragiri Hilir | 41.310 | 21.645 | 52,40 |
| **5** | Kab. Pelalawan | 19.851 | 14.003 | 70,54 |
| **6** | Kab. Rokan Hulu | 28.742 | 21.472 | 74,71 |
| **7** | Kab. Rokan Hilir | 45.783 | 25.326 | 55,32 |
| **8** | Kab. Siak | 26.107 | 19.458 | 74,53 |
| **9** | Kab. Kuantan Singingi | 16.803 | 11.950 | 71,12 |
| **10** | Kab. Kepulauan Meranti | 10.978 | 6.027 | 54,90 |
| **11** | Kota Pekanbaru | 62.932 | 52.544 | 83,49 |
| **12** | Kota Dumai | 16.395 | 12.478 | 76,11 |
| | **Provinsi Riau** | **377.350** | **257.228** | **68,17** |

Sumber data : Buku APK APM Kemendikbudristek

Dari tabel 3.15 tersebut menunjukkan ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang capaian APK berada dibawah rata-rata APK Provinsi, yaitu Kabupaten Kampar (66,15%), Kabupaten Bengkalis (64,48%), Kabupaten Indragiri Hilir (52,40%), Kabupaten Rokan Hilir (55,32%) dan Kabupaten Kep. Meranti 54,90%) dengan

capaian terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan capaian tertinggi adalah Kota Pekanbaru (83,49%). Dengan demikian intervensi pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai sasaran strategis pemerataan dan akses layanan pendidikan menengah yang seharusnya mendapat prioritas utama terhadap program dan kegiatan adalah Kabupaten Indragiri Hilir , Rokan Hilir,Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Kampar terutama untuk Sekolah jarak jauh.

Perbandingan Realisasi Kinerja APM SM sederajat tahun ini dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2024) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.16**
**Realisasi Kinerja APM SM sederajat tahun ini denganTarget Akhir Renstra (Tahun 2024)**

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun Akhir Renstra (2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya Akses Pendidikan | APM SM Sederajat | 68,00 | 68,17 | 100,25 | 67,88 | 66,43 | 97,86 |

Dari tabel 3.16 dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja APK SM sederajat Tahun ini dengan Target Akhir Tahun Renstra adalah sama karena tahun 2024 merupakan tahun terakhir Renstra Tahun 2019-2024. APM SM sederajat tahun ini dengan Standar Nasional pada tahun 2024 adalah :

**Tabel 3.17**
**Perbandingan Realisasi Kinerja**
**APM SM sederajat tahun ini Dengan Nasional**

| Uraian | APM sederajat Tahun 2024 |
|---|---|
| **Provinsi Riau** | 68,17 |
| **Nasional (Indonesia)** | 70,97 |

Sumber data : Buku APK APM Indonesia

Dari tabel 3.17 dapat dilihat bahwa Perbandingan Realisasi Kinerja APM SM sederajat Tahun ini dengan Nasional, capaian Provinsi Riau lebih rendah sebesar 68,17 persen sedang rata-rata nasional capaiannya lebih tinggi 2,80 poin yaitu sebesar 70,97 persen. Hal ini membuat Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus lebih mengupayakan peningkatan APM SM Sederajat untuk meningkatkan daya tampung melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan indikator kinerja APK SM Sederajat dan APM SM Sederajat sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan sebagai berikut :

a. Upaya yang dilakukan Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk pemenuhan Akses Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan serta Peningkatan partisipasi sekolah dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan pemberian bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT), Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB)
b. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau
    1. Kurangnya daya tampung Sekolah Menengah untuk lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke Pendidikan Menengah dan bertambahnya jumlah penduduk
    2. Belum tepatnya/alih fungsi sarana prasarana pendidikan di sekolah
    3. Masih banyaknya sarana Prasarana Pendidikan dalam Kondisi Rusak
    4. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau.
    5. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan serta tingginya biaya personal siswa
    6. Terbatasnya Anggaran Daerah.

c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

1. Melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Tahun 2024 Unit Sekolah Baru (USB) SMA 1 Unit dan SMK 1 Unit. Pembangunan RKB SMA 73 Ruang, SMK 18 Ruang dan SLB 7 Ruang. Pengadaan Mebel SMA 212 Paket dan SMK 53 Paket, SLB 29 Paket. Tahun 2025 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA 1 Unit SMK 1 Unit dan SLB 1 Unit. Pembangunan RKB SMA 21 Ruang dan SMK 20 Ruang, SLB Pembangunan Asrama 4 Unit.
2. Melakukan rehabilitasi infrastruktur bangunan sekolah, Tahun 2024 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA 12 Ruang SMK 4 Ruang dan SLB 9 Ruang. Tahun 2025 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA 60 Ruang, SMK 25 Ruang, SLB 10 Ruang.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB) dibeberapa daerah. Untuk tahun 2024/2025 SMATER memiliki 64 TKB dan 1.655 Siswa.
4. Pemenuhan akses Pendidikan agar menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran
5. Meningkatkan perolehan penerimaan DAK Fisik dari Pemerintah Pusat
6. Meningkatkan ketersediaan data Pendidikan yang akurat dan berkualitas
7. Memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan optimalisasi dalam penggunaannya dengan kebijakan tidak ada pungutan oleh sekolah kepada siswa di Sekolah Negeri dan subsidi pembebasan/pengurangan biaya pada siswa tidak mampu di sekolah swasta
8. Pemberian bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT) untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa untuk bersekolah baik bersekolah di Negeri maupun swasta. Untuk

bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT) Tahun 2024 sebanyak 4.353 siswa. Tahun 2025 sebanyak 4.800 Siswa BSM KAT.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Akses Pendidikan dan indikator APK SM Sederajat dan APM SM Sederajat dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.18**
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Akses Pendidikan | APK SM Sederajat | 98,41 | 86,79 | 11,62 |
| | APM SM Sederajat | 97,86 | | 11,07 |

Dari tabel 3.18 di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan cukup baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja Indikator APK SM Sederajat sebesar 98,41% dapat tercapai dengan serapan anggaran 86,79% dengan tingkat efisiensi mencapai 11,62% sedangkan untuk capaian kinerja Indikator APM SM Sederajat sebesar 97,86% dapat tercapai dengan serapan anggaran 86,79% dengan tingkat efisiensi mencapai 11,07%. Adapun analisis efisiensi serapan anggaran tahun 2024 terdapat permasalahan keuangan daerah yang mengakibatkan beberapa sub kegiatan mengalami tunda bayar dan akan di bayarkan pada tahun 2025.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
   - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
   - Pengadaan Mebel Sekolah
   - Penyediaan Biaya PersonilPeserta Didik SekolahMenengah Atas
   - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
   - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK) dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   - Pembangunan Ruang Kelas Baru
   - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
   - Pengadaan Mebel Sekolah
   - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan

c. Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan sub kegiatan sebagai berikut :
   - Pembangunan Ruang Kelas Baru
   - Rehabilitasi sedang/beratRuang Kelas Sekolah
   - Pengadaan Mebel Sekolah
   - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
   - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah

Dampak kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan terhadap masyarakat adalah meningkatnya masyarakat yang yang lulus SMP untuk bersekolah Sekolah Menengah Sederajat dan lulus di jenjang pendidikan SMA sederajat serta melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi serta dapat bekerja setelah menamatkan Sekolah Kejuruan/Vokasi.

**3. SASARAN 3 : MENINGKATNYA MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN**

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Tahun 2024 dengan indikator Persentase SMA dan SMK yang

berakreditasi A. Capaian sasaran indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A**

Indikator Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A dapat digunakan untuk ketercapaian sasaran meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan dihitung berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah SMA dan SMK yang berakreditasi A}}{\text{Jumlah Seluruh SMA dan SMK}} \times 100\%$$

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan dengan indikator Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.19**
**Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A**

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan | Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A | 44,98 | 44,65 | 99,27 | 44,94 | 43,51 | 96,82 |

Dari tabel 3.19 dapat dilihat bahwa Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan dengan indikator Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A pada Tahun 2024 adalah sebesar 99,27 persen dengan realisasi 44,65 dari target 44,98 sedangkan capaian pada Tahun 2023 adalah sebesar 96,82 persen dengan realisasi 43,51 dengan target 44,94. Capaian Indikator sasaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,45 persen dibandingkan dengan Capaian Tahun 2023. Berikut tabel realisasi indikator Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A pada Tahun 2024 :

**Tabel 3.20**
**Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A Tahun 2024**

| NO | KAB/KOTA | JUMLAH SMA DAN SMK | JUMLAH SMA SMK YANG BERAKREDITASI A | PERSENTASE SMA DAN SMK YANG BERAKREDITASI A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Bengkalis | 79 | 40 | 50,63 |
| 2 | Kab. Indragiri Hilir | 64 | 21 | 32,81 |
| 3 | Kab. Indragiri Hulu | 51 | 16 | 31,37 |
| 4 | Kab. Kampar | 90 | 40 | 44,44 |
| 5 | Kab. Kepulauan Meranti | 32 | 9 | 28,13 |
| 6 | Kab. Kuantan Singingi | 35 | 22 | 62,86 |
| 7 | Kab. Pelalawan | 48 | 20 | 41,67 |
| 8 | Kab. Rokan Hilir | 90 | 34 | 37,78 |
| 9 | Kab. Rokan Hulu | 76 | 26 | 34,21 |
| 10 | Kab. Siak | 66 | 32 | 48,48 |
| 11 | Kota Dumai | 36 | 16 | 44,44 |
| 12 | Kota Pekanbaru | 137 | 83 | 60,58 |
| | **TOTAL** | **804** | **359** | **44,65** |

Sumber data : Buku APK APM Kemendikbudristek

Dari tabel 3.20 tersebut menunjukkan capaian terendah Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A pada Tahun 2024 adalah Kabupaten Indragiri Hulu dengan capaian sebesar 31,37 persen sedangkan capaian tertinggi adalah Kota Pekanbaru dengan capaian sebesar 60,58 persen.

Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A pada Tahun 2024 tahun ini dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2024) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.21**
**Realisasi Kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A tahun ini denganTarget Akhir Renstra (Tahun 2024)**

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun Akhir Rentstra (2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan | Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A | 44,98 | 44,65 | 99,27 | 44,98 | 44,65 | 99,27 |

Dari tabel 3.21 dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A Tahun ini dengan Target Akhir Tahun Renstra adalah sama karena tahun 2024 merupakan akhir Tahun masa Renstra Tahun 2019-2024.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan indikator kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan sebagai berikut :

a. Upaya yang dilakukan Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan adalah Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan mutu/ kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Penguatan kelembagaan atau satuan pendidikan oleh Pengawas Pendidikan
b. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau
    1. Adanya Penambahan Sekolah baru berdiri belum dapat diakreditasi dan belum memenuhi syarat
    2. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam meningkatkan mutu guru dan siswa yang masih kurang
    3. Sinergi antara BAN Sekolah Madrasah, BAP sebagai lembaga akreditasi/penjaminan mutu dengan Dinas Pendidikan belum optimal.
    4. Keterlambatan penyelesaian administrasi akreditasi dari satuan Pendidikan.
    5. Masa berlakunya Akreditasi yang sudah habis, tetapi belum diakreditasi kembali oleh BAN-SM.
    6. Kompetensi staf pada tingkat satuan pendidikan dalam membuat evaluasi diri sekolah (EDS) masih kurang.
    7. Kemampuan sekolah dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan masih kurang.
    8. Masih kurangnya kualitas dan kompetensi guru
    9. Masih kurangnya kualitas/lulusan siswa

c. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

1. Meningkatkan sarana prasarana dan utilitas sekolah dalam meningkatkan mutu dan pelayanan kepada para siswa dengan membangun dan merehabilitasi Ruang Laboratorium IPA (Fisika, Kimia dan Biologi) dan meubiler dan alat praktek dan peraga, pembangunan asrama sekolah, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru/Penjaga Sekolah,
2. Meningkatkan sinergi BAN Sekolah Madrasah, BAP sebagai lembaga akreditasi/penjaminan mutu dengan Dinas Pendidikan dan meningkatkan kemampuan sekolah dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan melalui Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi guru melalui Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan (pelatihan, Inhouse training, dan peningkatan pendidikan)
4. Meningkatkan kualitas/lulusan siswa melalui Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik dan Pembinaan bakat dan kreativitas Siswa.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan dan indikator Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.22**
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan | Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A | 96,82 | 86,66 | 10,16 |

Dari tabel 3.22 di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan cukup baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja Indikator Persentasi SMA dan SMK yang berakreditasi A sebesar 96,82% dapat tercapai dengan serapan anggaran 86,66% dengan tingkat efisiensi mencapai 10,16%. Adapun analisis efisiensi serapan anggaran tahun 2024 terdapat permasalahan keuangan daerah yang mengakibatkan beberapa sub kegiatan mengalami tunda bayar dan akan di bayarkan pada tahun 2025.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan dengan indikator kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada sub kegiatan sebagai berikut :
   - Pembangunan Ruang Guru/Kepala sekolah/TU
   - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
   - Pembangunan Perpustakaan Sekolah
   - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
   - Pembangunan Asrama Sekolah
   - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
   - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
   - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
   - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
   - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
   - Pengadaaan  Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
   - Pembinaan bakat dan kreativitas Siswa
   - Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas
   - Pembinaan Kelembagaan dan
   - Manajemen Sekolah Menengah Atas
   - Pembangunan RumahDinas KepalaSekolah/Guru/PenjagaSekolah

- Rehabilitasi sedang/beratAsrama Sekolah
- Pembangunan RuangLaboratorium
- Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Laboratorium
- Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / PenjagaSekolah
- Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK) pada sub kegiatan sebagai berikut :
   - Pembangunan Ruang Praktik Siswa
   - Pembangunan RuangLaboratorium
   - Pembangunan Ruang UnitKesehatan Sekolah
   - PembangunanPerpustakaan Sekolah
   - Pembangunan AsramaSekolah
   - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
   - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
   - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
   - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
   - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
   - Rehabilitasi sedang/beratSarana, Prasarana danUtilitas Sekolah
   - Penyelengaraan ProsesBelajar Peserta Didik
   - Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah

c. Pengelolaan Pendidikan Khusus pada sub kegiatan sebagai berikut :
   - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
   - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
   - Pembangunan Perpustakaan Sekolah
   - Pembangunan Asrama Sekolah
   - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
   - Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
   - Pembangunan Ruang Bina Persepsi
   - Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)

- Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Dampak kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan terhadap masyarakat adalah meningkatnya kualitas/mutu pendidikan di sekolah yang telah berkareditasi A. Dimana masyarakat/siswa akan merasakan dan memanfaatkan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kualitas guru yang sangat baik dan peluang masyarakat/siswa yang lulus berprestasi dapat kuliah melalui jalur eligible (SNBP) dan meningkatnya masyarakat/siswa yang melanjutkan pendidikan melalui SNBT maupun jalur mandiri dan Sekolah Kejuruan bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri baik pemagangan dan penerimaan tenaga kerja serta Lulusan siswa Kejuruan dapat diterima bekerja dengan kompetensi yang mumpuni maupun membuka usaha sendiri.

**4. SASARAN 4 : MENINGKATNYA NILAI SAKIP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024 dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Capaian sasaran indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

Indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan

kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inpektorat Provinsi Riau.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.23**
**Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP**
**Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | 74,50 | 74,60 | 100,13 | 74 | 73,25 | 98,99 |

Dari tabel 3.23 dapat dilihat bahwa Capaian Sasaran Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Tahun 2024 adalah sebesar 100,13 persen dengan realisasi 74,60 perse dari target 74,50 sedangkan capaian pada Tahun 2023 adalah sebesar 96,82 dengan realisasi 73,25 dengan target 73,25. Capaian Indikator sasaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,15 persen dibandingkan dengan Capaian Tahun 2023. Berikut tabel realisasi indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Tahun 2024:

**Tabel 3.24**
**Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024**

| No | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 25,50 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30 | 16,8 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 12,30 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi | 25 | 20 |
| | **Nilai Hasil Evaluasi** | **100** | **74,60** |
| | **Tingkat Akuntabiltas Kinerja** | | **BB** |

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Tahun 2024 tahun ini dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2024) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.25**
**Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun ini denganTarget Akhir Renstra (Tahun 2024)**

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun Akhir Renstra (2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | 74,50 | 74,60 | 100,13 | 74,50 | 74,60 | 100,13 |

Dari tabel 3.25 dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun ini dengan Target Akhir Tahun Renstra adalah sama karena tahun 2024 merupakan akhir Tahun masa Renstra Tahun 2019-2024.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP
   a. Perencanaan Kinerja

      Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah memperbaiki system manajemen kinerja, Hal tersebut ditunjukkan dengan telah tersedianya dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang baik dan perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

   b. Pengukuran Kinerja

      Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menginput data pada aplikasi SIAPADIA sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala. Namun demikian, kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta belum ada penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

   c. Pelaporan Kinerja

      Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023. Laporan kinerja tersebut telah menggambarkan kinerja, memenuhi standar kualitas atas. Pencapaian kinerja, menyajikan informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

   d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

      Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai sehingga berdampak meningkatnya efektifitas dan efisiensi kinerja.

2. Rekomendasi

   Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar:

a. Perencanaan Kinerja

Melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

Agar pada pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.26**
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | 98,99 | 97,46 | 1,53 |

Dari tabel 3.26 di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran cukup baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja Indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebesar 98,99% dapat tercapai dengan serapan anggaran 97,46% dengan tingkat efisiensi mencapai 1,53%. Adapun analisis efisiensi serapan anggaran tahun 2024 terdapat permasalahan keuangan daerah yang mengakibatkan beberapa sub kegiatan mengalami tundabayar dan akan dibayarkan pada tahun 2025.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK)
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar **Rp.2.703.576.884.271,23** dengan pagu anggaran yang tersedia yaitu sebesar **Rp.2.914.402.826.922,00.** Sisa Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah Rp. 210.658.731.755,77 hal ini disebabkan adanya permasalahan keuangan daerah sehingga kegiatan fisik bangunan dan pengadaan oleh pihak ketiga mengalami tunda bayar pada tahun 2024 dan akan dibayarkan pada tahun 2025. Realisasi Anggaran yang mendukung kinerja sasaran dan indikator berdasarkan program dan kegiatan/sub kegiatan. Berikut adalah Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran :

## Tabel 3.27
## Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (RP) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
| 1 | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | 1 | Rata-Rata Lama Sekolah | 9,40-9,35 | 9,43 | 100,32 | 1.278.423.968.938 | 1.109.142.818.376 | 86,76 |
| | | 2 | Harapan Lama Sekolah | 13,44-13,60 | 13,42 | 99,85 | | | |
| 2 | Meningkatnya Akses Pendidikan | 1 | APK SM Sederajat | 91,9 | 90,44 | 98,41 | **948.131.123.759** | **822.903.115.124** | 86,79 |
| | | 2 | APM SM Sederajat | 67,88 | 66,43 | 97,86 | | | |
| 3 | Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan | Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A | | 44,94 | 43,51 | 96,82 | **330.292.845.179** | **286.239.703.252** | 86,66 |
| 4 | Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | | 74 | 73,25 | 98,99 | **1.635.978.857.984** | **1.594.434.065.895** | 97,46 |

Dari tabel 3.27 di atas terlihat bahwa Sasaran Strategis sesuai Perjanjian Kinerja Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah yang merupakan Indikator Kinerja Gubernur Riau Bidang Pendidikan maka di dukung oleh Seluruh Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendidikan dengan Pagu Anggaran Rp.1.278.423.968.938 dan realisasi sebesar Rp. 1.109.142.818.376. Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan dengan Indikator Kinerja APK SM Sederajat dan APM SM Sederajat di dukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan yang dapat meningkatkan akses pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan Pagu Anggaran Rp. 330.292.845.179 dan realisasi sebesar Rp. 286.239.703.252. Sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan dengan Indikator Kinerja Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A di dukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan yang dapat meningkatkan Mutu, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Pagu Anggaran Rp. 330.292.845.179 dan realisasi sebesar Rp. 286.239.703.252. Sasaran Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau di dukung oleh Program

Pengelolaan Pendidikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pagu Anggaran Rp. 1.635.978.857.984 dan realisasi sebesar Rp. 1.594.434.065.895.

# BAB IV
# PENUTUP

## 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) di dunia pendidikan. Ringkasan pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**
**Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024**

| Sasaran | Indikator | | Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | 1 | Rata-Rata Lama Sekolah | 9,40-9,35 | 9,43 | 100,32 |
| | 2 | Harapan Lama Sekolah | 13,44-13,60 | 13,42 | 99,85 |
| Meningkatnya Akses Pendidikan | 1 | APK SM Sederajat | 92,40 | 92,10 | 99,68 |
| | 2 | APM SM Sederajat | 68,00 | 68,17 | 100,25 |
| Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan | Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A | | 44,98 | 44,65 | 99,27 |
| Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | | 74,50 | 74,60 | 100,13 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2024 yang diukur berdasarkan sasaran strategis yang telah dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dengan indikator RLS dan HLS telah mencapai target 100,32 persen pada tahun 2024.
2. Meningkatnya Akses Pendidikan dengan indikator APK SM Sederajat dan APM SM sederajat telah mencapai target 99,68 dan 100,25.
3. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan dengan indikator Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A telah mencapai target 99,27 persen.

4. Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah mencapai target 100,13.

## 4.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Dinas Pendidikan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang yaitu

1. Untuk meningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan melalui Kebijakan membangun USB dan RKB dan Meningkatkan Kualitas Ruang Kelas.
2. Untuk Meningkatkan Aksebiltas Layanan Pendidikan Melalui Kebijakan Pemenuhan operasional Sekolah dan Pendirian layanan khusus pendidikan (Sekolah menengah terbuka).
3. Untuk meningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik Melalui Kebijakan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi, Meningkatkan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Meningkatkan pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik.
4. Untuk meningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas Pendidikan melalui kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan menengah dan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan layanan khusus.

5. Untuk meningkatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan melalui kebijakan Meningkatkan kerjasama pendidikan kejuruan dengan DUDI, Meningkatkan manajemen sekolah berbasis vokasi dan Meningkatkan sarana prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan DUDI.

# LAMPIRAN
# PERJANJIAN KINERJA

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
# DINAS PEDIDIKAN PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TENGKU FAUZAN TAMBUSAI, S.STP**

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : **S.F. HARIYANTO**

Jabatan : Pj. GUBERNUR RIAU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihakpertama.

Pihak keduaakan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Maret 2024

| | |
|---|---|
| **Pihak Kedua** | **Pihak Pertama** |
| **Pj. GUBERNUR RIAU** | **Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau** |
| **S.F. HARIYANTO** | **TENGKU FAUZAN TAMBUSAI, S.STP** |
| | **Pembina Utama Madya** |
| | **NIP. 19790704 199810 1 001** |

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
# DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | 1. Rata- rata lama sekolah penduduk umur >25 Tahun | 9,35-9,40 |
| | | 2. Harapan Lama Sekolah | 13,44-13,60 |
| 2 | Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan | 1. APK SM Sederajat | 92,40 |
| | | 2. APM SM Sederajat | 68,00 |
| 3 | Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan | Persentase SMA dan SMK yang berakreditasi A | 44,98 |
| 4 | Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau | 74,50 |

| | PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Pendidikan | Rp | 1.260.878.467.343,00 | |
| 2. | Program Pengembangan Kurikulum | Rp | 251.851.915,00 | |
| 3. | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp | 34.865.221.835,00 | |
| 4. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp | 1.569.552.460.550,00 | |
| | **Total** | **Rp** | **2.865.548.001.643,00** | |

Pekanbaru, Maret 2024

**Pj. GUBERNUR RIAU,**

**S.E. HARIYANTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**

**TENGKU FAUZAN TAMBUSAI, S.STP**
**Pembina Utama Madya**
**NIP. 19790704 199810 1 001**

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024**
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Realisasi Target | Capaian Target (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **100%** | **90,94%** | **122,19%** | **1.633.873.225.262** | **1.592.535.586.549** | **97,47%** |
| | **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | |
| | **1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**<br>**Indikator : Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan kinerja Perangkat Daerah** | **12 Dokumen** | **100%** | **100,00%** | **5.329.450.856,00** | **3.982.857.552,00** | **74,73%** |
| | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00% | 3.690.405.819,00 | 3.197.607.884,00 | 86,65% |
| | 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 5 Laporan | 100,00% | 1.639.045.037,00 | 785.249.668,00 | 47,91% |
| | **2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**<br>**Indikator : Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **157,00%** | **157,32%** | **1.602.579.281.032,00** | **1.572.240.213.977,00** | **98,11%** |
| | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.697 Orang | 14.890 Orang | 157,32% | 1.602.579.281.032 | 1.572.240.213.977,00 | 98,11% |
| | **3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**<br>**Indikator : Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **282.829.925,00** | **243.300.366,00** | **86,02%** |
| | 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 282.829.925,00 | 243.300.366,00 | 86,02% |
| | **4 Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **209,21%** | **6.766.660.617,00** | **3.914.452.283,00** | **57,85%** |
| | **Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah** | | | | | | |
| | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9 Paket | 9 Paket | 100,00% | 199.998.512,00 | 199.513.509,00 | 99,76% |
| | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 55 Paket | 53 Paket | 373,58% | 3.358.847.306,00 | 1.896.421.317,00 | 56,46% |
| | 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2.290 Paket | 8.754 Paket | 382,27% | 400.000.000,00 | 203.683.000,00 | 50,92% |
| | 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17 Paket | 17 Paket | 100,00% | 794.999.799,00 | 140.466.500,00 | 17,67% |
| | 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 510 Laporan | 460 Laporan | 90,20% | 2.012.815.000,00 | 1.474.367.957,00 | 73,25% |
| | **5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **29 Unit** | **29 Unit** | **100,00%** | **1.034.870.000,00** | **474.000.000,00** | **45,80%** |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Target | Realisasi Target | Capaian Target (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | **Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yag Disediakan** | ~~29 Unit~~ | ~~29 Unit~~ | ~~100,00%~~ | ~~1.034.870.000,00~~ | ~~474.000.000,00~~ | ~~45,80%~~ |
| | | 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 29 Unit | 29 Unit | 100,00% | 1.034.870.000,00 | 474.000.000,00 | 45,80% |
| | 6 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **455 Orang** | **404 Orang** | **88,79%** | **9.059.713.680,00** | **7.280.524.031,00** | **80,36%** |
| | | **Indikator : Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani** | | | | | | |
| | | 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | 2.549.556.812,00 | 1.721.784.838,00 | 67,53% |
| | | 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 223 Laporan | 212 Laporan | 95,07% | 6.510.156.868,00 | 5.558.739.193,00 | 85,39% |
| | 7 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100,00%** | **100,00%** | **5.298.499.152,00** | **4.400.238.340,00** | **83,05%** |
| | | **Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang dipelihara** | | | | | | |
| | | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 17 Unit | 17 Unit | 100,00% | 268.360.000,00 | 191.987.961 | 71,54% |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 17 Unit | 17 Unit | 100,00% | 230.310.000,00 | 190.154.506 | 82,56% |
| | | 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 45 Unit | 45 Unit | 100,00% | 299.830.000,00 | 247.875.000 | 82,67% |
| | | 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15 Unit | 15 Unit | 100,00% | 4.499.999.152,00 | 3.770.220.873,00 | 83,78% |
| | 8 | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **21 Sekolah** | **0 Sekolah** | **0,00%** | **3.521.920.000** | **-** | 0,00% |
| | | 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 21 Sekolah | 0 Sekolah | 0,00% | 3.521.920.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **II** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | **63,84%** | **76,12%** | **146,87%** | **1.243.746.375.937,00** | **1.079.633.643.173,03** | **86,80%** |
| | **indikator :** | | | | | | | |
| | **Angka partisipasi sekolah** | | 80,10% | 78,15% | 97,57% | | | |
| | **Persentase anak berkubutuhan khusus yang mendapatkan Akses pendidikan** | | 24,04% | 56,75% | 236,06% | | | |
| | **Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang terakreditasi Minimal B** | | 87,38% | 93,47% | 106,97% | | | |
| | 1 | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** | **97,07%** | **82,09%** | **84,57%** | **743.293.885.371** | **637.511.372.720** | **85,77%** |
| | | **Indikator : Persentase SMA yang berakreditasi minimal B** | | | | | | |
| | | 1 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | 1 Unit | 1 Unit | 100,00% | 6.830.956.465,00 | 6.487.996.049,00 | 94,98% |

| No. | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Realisasi Target | Capaian Target (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 13 ruang | 13 ruang | 100,00% | 7.358.720.813,00 | 6.312.812.976,00 | 85,79% |
| | | 3 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 13 ruang | 13 ruang | 100,00% | 3.211.303.960,00 | 3.105.872.051,00 | 96,72% |
| | | 4 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 1 ruang | 1 ruang | 100,00% | 1.177.464.699,00 | 1.136.289.536,00 | 96,50% |
| | | 5 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | 1 ruang | 1 ruang | 100,00% | 2.448.049.801,00 | 1.394.847.179,00 | 56,98% |
| | | 6 | Pembangunan Asrama Sekolah | 1 Unit | 1 ruang | 100,00% | 1.498.249.739,00 | 1.420.100.144,00 | 94,78% |
| | | 7 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 110 paket | 109 paket | 99,09% | 23.228.128.236,00 | 17.250.594.806,00 | 74,27% |
| | | 8 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 39 ruang | 39 ruang | 100,00% | 11.014.850.569,00 | 7.227.210.917,00 | 65,61% |
| | | 9 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 8 ruang | 8 ruang | 100,00% | 2.322.903.805,00 | 1.466.168.347,00 | 63,12% |
| | | 10 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 1 ruang | 1 ruang | 100,00% | 272.026.000,00 | 13.140.000 | 4,83% |
| | | 11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | 2 Unit | 2 Unit | 100,00% | 1.915.382.914,00 | 1.552.221.048,00 | 81,04% |
| | | 12 | Pengadaan Mebel Sekolah | 83 Paket | 87 Paket | 104,82% | 23.035.887.460,00 | 17.509.856.824,00 | 76,01% |
| | | 13 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 1 Paket | 0 | 0,00% | 5.462.053.580,00 | 4.063.975.000,00 | 74,40% |
| | | 14 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 98 paket | 98 paket | 100,00% | 38.103.586.880,00 | 36.492.025.320,00 | 95,77% |
| | | 15 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | 122 Peserta Didik | 122 Peserta Didik | 100,00% | 600.000.000,00 | 127.700.000 | 21,28% |
| | | 16 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 1164 Peserta Didik | 1164 Peserta Didik | 100,00% | 6.962.664.522,00 | 5.899.104.710,00 | 84,72% |
| | | 17 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 4837 Orang | 4837 Orang | 100,00% | 3.528.508.983,00 | 3.199.245.025,00 | 90,67% |
| | | 18 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | 459 Satuan Pendidikan | 456 Satuan Pendidikan | 99,35% | 2.148.329.728,00 | 1.890.238.293,00 | 87,99% |
| | | 19 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | 446 Satuan Pendidikan | 446 Satuan Pendidikan | 100,00% | 269.113.748.000,00 | 267.154.020.142 | 99,27% |
| | | 20 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | 446 Satuan Pendidikan | 446 Satuan Pendidikan | 100,00% | 239.350.837.278,00 | 168.663.816.747,00 | 70,47% |
| | | 21 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | 1 Unit | 1 unit | 100,00% | 1.589.850.380,00 | 1.511.862.064,00 | 95,09% |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | | Target | Realisasi Target | Capaian Target (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 6 unit | 6 unit | 100,00% | 474.449.939,00 | 426.572.497,00 | 89,91% |
| | | 23 | Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah | 2 Unit | 2 Unit | 100,00% | 741.869.870,00 | 688.156.575,00 | 92,76% |
| | | 24 | Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi | 29 ruang | 30 ruang | 103,45% | 18.768.465.695,00 | 17.162.617.082,00 | 91,44% |
| | | 25 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | 3 ruang | 3 ruang | 100,00% | 1.005.177.718,00 | 669.553.629,00 | 66,61% |
| | | 26 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 99 ruang | 73 ruang | 73,74% | 53.669.255.280,00 | 50.906.242.610,00 | 94,85% |
| | | 27 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 1 unit | 1 unit | 100,00% | 247.374.823,00 | 27.768.705,00 | 11,23% |
| | | 28 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 459 Satuan Pendidikan | 459 Satuan Pendidikan | 100,00% | 17.213.788.234,00 | 13.751.364.444,00 | 79,89% |
| | | | | | | | | | |
| | **2** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** | | **87,52%** | **87,52%** | **111,15%** | **435.490.095.070** | **387.759.550.199** | **89,04%** |
| | | **Indikator : Persentase SMK yang berkareditasi** | | | | | | | |
| | | 1 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | 1 Unit | 0 Unit | 0,00% | 525.661.000,00 | 507.837.095,00 | 96,61% |
| | | 2 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | 13 ruang | 13 Ruang | 100,00% | 22.232.723.819,00 | 21.189.328.718,00 | 95,31% |
| | | 3 | Pembangunan Ruang Laboratorium | 8 ruang | 8 Ruang | 100,00% | 5.049.597.917,00 | 4.885.360.255,00 | 96,75% |
| | | 4 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 7 ruang | 7 ruang | 100,00% | 1.600.333.000,00 | 1.518.625.652,00 | 94,89% |
| | | 5 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 1 ruang | 5 ruang | 500,00% | 3.183.895.885,00 | 3.012.978.925,00 | 94,63% |
| | | 6 | Pembangunan Asrama Sekolah | 2 Unit | 2 Unit | 100,00% | 1.313.919.653,00 | 1.281.705.432 | 97,55% |
| | | 7 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 31 Unit | 31 Unit | 100,00% | 12.141.669.255,00 | 11.056.076.715,00 | 91,06% |
| | | 8 | Pengadaan Mebel Sekolah | 52 Paket | 53 Paket | 101,92% | 9.658.103.770,00 | 9.492.189.249,00 | 98,28% |
| | | 9 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 71 Paket | 71 Paket | 100,00% | 54.063.154.965,00 | 53.686.892.865,00 | 99,30% |
| | | 10 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 336 peserta | 336 peserta | 100,00% | 3.648.182.782,00 | 2.203.133.848,00 | 60,39% |
| | | 11 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 2017 Orang | 200 orang | 9,92% | 1.228.444.921,00 | 951.277.941,00 | 77,44% |
| | | 12 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | 311 Satuan Pendidikan | 311 Satuan Pendidikan | 100,00% | 1.162.281.879,00 | 729.876.059,00 | 62,80% |
| | | 13 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | 300 Satuan Pendidikan | 300 Satuan Pendidikan | 100,00% | 172.224.712.000,00 | 168.961.597.445 | 98,11% |
| | | 14 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | 314 Satuan Pendidikan | 314 Satuan Pendidikan | 100,00% | 124.649.200.000,00 | 89.724.776.915,00 | 71,98% |
| | | 15 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2 Unit | 2 Unit | 100,00% | 197.026.200,00 | 134.159.685,00 | 68,09% |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | | Target | Realisasi Target | Capaian Target (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 18 Ruang | 18 Ruang | 100,00% | 7.101.168.454,00 | 6.914.383.794,00 | 97,37% |
| | | 17 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | 4 Ruang | 4 Ruang | 100,00% | 776.725.800,00 | 737.170.830,00 | 94,91% |
| | | 18 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | 300 Satuan Pendidikan | 300 Satuan Pendidikan | 100,00% | 14.359.553.970,00 | 10.412.882.539,00 | 72,52% |
| | | 19 | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 1 Unit | 1 Unit | 100,00% | 373.739.800,00 | 359.296.237,00 | 96,14% |
| | | | | | | | | | |
| | 3 | **Pengelolaan Pendidikan Khusus** | | **72,34%** | **72,34%** | **87,22%** | **64.962.395.496,00** | **54.362.720.254,03** | **83,68%** |
| | | **Indikator : Persentase Sekolah Pendidikian Khusus yang terakreditasi minimal B** | | | | | | | |
| | | 1 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 2 Ruang | 2 Ruang | 100,00% | 401.751.650,00 | 388.544.401,38 | 96,71% |
| | | 2 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 2 Ruang | 2 Ruang | 100,00% | 599.324.000,00 | 588.087.683,44 | 98,13% |
| | | 3 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 1 Ruang | 1 Ruang | 100,00% | 265.720.000,00 | 258.095.974,00 | 97,13% |
| | | 4 | Pembangunan Asrama Sekolah | 2 Unit | 2 Unit | 100,00% | 807.188.000,00 | 29.969.700,00 | 3,71% |
| | | 5 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 8 Unit | 10 Unit | 125,00% | 3.866.593.650,00 | 3.747.470.780,38 | 96,92% |
| | | 6 | Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas | 2 Ruang | 2 Ruang | 100,00% | 605.560.000,00 | 593.304.797,25 | 97,98% |
| | | 7 | Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) | 1 Ruang | 1 Ruang | 100,00% | 223.020.000,00 | 219.479.716,00 | 98,41% |
| | | 8 | Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) | 4 Ruang | 4 Ruang | 100,00% | 943.415.000,00 | 933.185.939,90 | 98,92% |
| | | 9 | Pengadaan Mebel Sekolah | 29 Paket | 29 Paket | 100,00% | 1.985.017.744,00 | 922.232.028 | 46,46% |
| | | 10 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 1 Paket | 0 Paket | 0,00% | 89.500.715,00 | 1.206.850,00 | 1,35% |
| | | 11 | Pengadaaan  Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 24 Paket | 24 Paket | 100,00% | 1.871.848.000,00 | 1.854.768.456,00 | 99,09% |
| | | 12 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 695 Peserta Didik | 695 Peserta Didik | 100,00% | 1.883.754.783,00 | 1.786.590.709,00 | 94,84% |
| | | 13 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | 1834 Orang | 120 Orang | 6,54% | 474.745.790,00 | 452.050.250,00 | 95,22% |
| | | 14 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | 47 Satuan Pendidikan | 47 Satuan Pendidikan | 100,00% | 1.119.524.857,00 | 420.991.330,00 | 37,60% |
| | | 15 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 47 Satuan Pendidikan | 47 Satuan Pendidikan | 100,00% | 16.268.000.000,00 | 15.790.428.667,00 | 97,06% |
| | | 16 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 188 Orang | 188 Orang | 100,00% | 5.082.400.000,00 | 4.897.988.898,00 | 96,37% |
| | | 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1 unit | 1 unit | 100,00% | 290.657.000,00 | 285.385.701,50 | 98,19% |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | | Target | Realisasi Target | Capaian Target (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 7 ruang | 7 ruang | 100,00% | 5.027.861.000,00 | 4.890.983.843,32 | 97,28% |
| | | 19 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 47 Satuan Pendidikan | 47 Satuan Pendidikan | 100,00% | 22.414.224.307,00 | 15.703.141.788,00 | 70,06% |
| | | 20 | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah | 0 Unit | 0 Unit | 0,00% | - | - | 0,00% |
| | | 21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 9 ruang | 9 ruang | 100,00% | 742.289.000,00 | 598.812.741,00 | 80,67% |
| | | | | | | | | | |
| **III** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | | | | |
| | **Indikator : Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal** | | | **90,00%** | **90,00%** | **41,67%** | **236.071.915,00** | **221.036.400,00** | **93,63%** |
| | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan** | | | | | | | | |
| | **Indikator : Jumlah kurikulum muatan lokal yang diimplementasi pada satuan pendidikan menengah** | | | **1 Kurikulum** | **1 Kurikulum** | **41,67%** | **236.071.915,00** | **221.036.400,00** | **93,63%** |
| | | 1 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | 120 Orang | 50 orang | 41,67% | 236.071.915,00 | 221.036.400,00 | 93,63% |
| | | | | | | | | | |
| **IV** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator : Rasio Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus** | | | **70 Poin** | **70 Poin** | **100,00%** | **24.648.600.415,00** | **23.199.756.040,00** | **94,12%** |
| | **1.** | | **Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi** | **80 Sekolah** | **80 Sekolah** | 100,00% | **24.648.600.415,00** | **23.199.756.040,00** | **94,12%** |
| | | 1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 1 Dokuemen | 1 Dokumen | 100,00% | 24.648.600.415,00 | 23.199.756.040,00 | 94,12% |
| | **CABANG DINAS WILAYAH I** | | | | | | **3.038.342.006,00** | **1.781.995.563,00** | **58,65** |
| **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | |
| | **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan** | | | **100%** | **100%** | **95,33%** | **500.335.864,00** | **433.573.063,00** | **86,66%** |
| | **1** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | |
| | | | **Indikator : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah** | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **100,00%** | **202.337.156,00** | **140.164.739,00** | **69,27%** |
| | | 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50 Paket | 50 Paket | 100,00% | 59.997.302,00 | 55.887.726,00 | 93,15% |
| | | 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 960 Paket | 624 Paket | 65,00% | 38.000.000,00 | 24.688.000,00 | 64,97% |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Realisasi Target | Capaian Target (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10 Paket | 6 Paket | 60,00% | 34.999.854,00 | 20.744.013,00 | 59,27% |
| | 4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 laporan | 119 Laporan | 119,00% | 69.340.000,00 | 38.845.000,00 | 56,02% |
| **2** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**<br>**Indikator : Jumlah PNS dan Non PNS Yang Dilayani** | **455 Orang** | **404 Orang** | **88,79%** | **209.998.940,00** | **206.658.286,00** | **98,41%** |
| | 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | 29.998.940,00 | 29.467.750,00 | 98,23% |
| | 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7 Laporan | 7 Laporan | 100,00% | 180.000.000,00 | 177.190.536,00 | 98,44% |
| **3** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**<br>**Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Yang Dipelihara** | **100%** | **100%** | **100,00%** | **87.999.768,00** | **86.750.038,00** | **98,58%** |
| | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 unit | 1 unit | 100,00% | 37.999.768,00 | 36.750.038,00 | 96,71% |
| | 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 unit | 1 unit | 100,00% | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00% |
| **II** | **PROGRAM PENGELOLAAN PEDIDIKAN**<br>**Indikator 1 : Persentase Angka Sekolah**<br>**Indikator 2 : Persentase anak berkebutuhan Khusus yang mendapatkan akses pendidikan**<br>**Indikator 3 : Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B** | **80,10 persen**<br>**24,04 persen**<br>**87,37 persen** | **78,15 persen**<br>**56,75 persen**<br>**93,47 persen** | **97,57%**<br>**236,06 %**<br>**106,97 %** | **2.538.006.142,00** | **1.348.422.500,00** | **53,13%** |
| **1** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** | **97,07%** | **97,07%** | **100,00%** | **1.264.220.955,00** | **715.046.813,00** | **56,56%** |
| | 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4 Ruang | 4 Ruang | 100,00% | 939.625.505,00 | 468.086.945,00 | 49,82% |
| | 2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 480 Orang | 480 Orang | 100,00% | 324.595.450,00 | 246.959.868,00 | 76,08% |
| **2** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**<br>**Indikator : Persentase SMK yang berakreditasi minimal B** | **87,52%** | **87,52%** | **100,00%** | **1.273.785.187,00** | **633.375.687,00** | **49,72%** |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Realisasi Target | Capaian Target (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 480 Orang | 480 Orang | 100,00% | 335.888.690,00 | 168.677.795,00 | 50,22% |
| | 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4 Ruang | 4 Ruang | 100,00% | 937.896.497,00 | 464.697.892,00 | 49,55% |
| **CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II** | | | | | **2.871.454.794,00** | **648.264.612,00** | **22,58** |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BIDANG PENDIDIKAN)**<br>**Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan** | **100%** | **100%** | **100,00%** | **520.088.479,00** | **449.676.561,00** | **86,46%** |
| | **1 Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **100,00%** | **216.150.814,00** | **191.033.378,00** | **88,38%** |
| | 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50 Paket | 50 Paket | 100,00% | 59.999.010,00 | 59.294.927,00 | 98,83% |
| | 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 960 Paket | 960 Paket | 100,00% | 38.000.000,00 | 37.899.794,00 | 99,74% |
| | 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10 Paket | 10 Paket | 100,00% | 32.101.804,00 | 31.843.657,00 | 99,20% |
| | 4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 laporan | 100 laporan | 100,00% | 86.050.000,00 | 61.995.000,00 | 72,05% |
| | **2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **455 Orang** | **404 Orang** | **100,00%** | **235.017.665,00** | **223.869.710,00** | **95,26%** |
| | 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | 46.074.665,00 | 43.058.574,00 | 93,45% |
| | 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4 laporan | 4 laporan | 100,00% | 188.943.000,00 | 180.811.136,00 | 95,70% |
| | **3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00%** | **68.920.000,00** | **34.773.473,00** | **50,45%** |
| | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 unit | 1 unit | 100,00% | 68.920.000,00 | 34.773.473,00 | 50,45% |
| **2** | **Program Pengelolaan Pendidikan**<br>**Indikator 1 : Persentase Angka Sekolah**<br>**Indikator 2 : Persentase anak berkebutuhan Khusus yang mendapatkan akses pendidikan**<br>**Indikator 3 : Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B** | **80,10 persen**<br>**24,04 persen**<br><br>**87,38 persen** | **78,15 persen**<br>**56,75 persen**<br><br>**93,47 persen** | **97,57%**<br>**236,06 %**<br><br>**106,97 %** | **2.351.366.315,00** | **198.588.051,00** | **8,45%** |
| | **1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** | **97,07%** | **97,07%** | **100,00%** | **1.178.798.191,00** | **195.595.551,00** | **16,59%** |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | | Target | Realisasi Target | Capaian Target (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4 Ruang | 4 Ruang | 100,00% | 945.997.719,00 | - | 0,00% |
| | | 2 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 480 Orang | 480 Orang | 100,00% | 232.800.472,00 | 195.595.551,00 | 84,02% |
| | **2** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** | | **86,52%** | **86,52%** | **100,00%** | **1.172.568.124,00** | **2.992.500,00** | **0,26%** |
| | | 1 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | 4 Ruang | 4 Ruang | 100,00% | 938.195.358,00 | 2.992.500,00 | 0,32% |
| | | 2 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 480 Orang | 480 Orang | 100,00% | 234.372.766,00 | - | 0,00% |
| | **CABANG DINAS WILAYAH III** | | | | | | **3.050.417.289,00** | **2.004.995.804,00** | **65,73** |
| | **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BIDANG PENDIDIKAN)** | | **100%** | **100%** | **100,00%** | **578.203.833,00** | **515.471.277,00** | **89,15%** |
| | | **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan** | | | | | | | |
| | **1** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **100,00%** | **223.888.245,00** | **184.480.790,00** | **82,40%** |
| | | 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50 Paket | 50 paket | 100,00% | 59.998.502,00 | 56.878.290,00 | 94,80% |
| | | 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 960 Paket | 960 paket | 100,00% | 29.800.000,00 | 28.145.600,00 | 94,45% |
| | | 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10 Paket | 10 Paket | 100,00% | 34.999.743,00 | 28.861.900,00 | 82,46% |
| | | 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 100 Laporan | 100,00% | 99.090.000,00 | 70.595.000 | 71,24% |
| | **2** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **455 Orang** | **455 Orang** | **100,00%** | **238.955.588,00** | **216.183.885,00** | **90,47%** |
| | | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | 59.578.588,00 | 38.751.773,00 | 65,04% |
| | | 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7 laporan | 7 laporan | 100,00% | 179.377.000,00 | 177.432.112,00 | 98,92% |
| | **3** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **100 persen** | **100 persen** | **100,00%** | **115.360.000,00** | **114.806.602,00** | **99,52%** |
| | | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 unit | 1 unit | 100,00% | 35.360.000,00 | 34.806.602,00 | 98,43% |
| | | 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 unit | 1 unit | 100,00% | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 100,00% |
| | | **Program Pengelolaan Pendidikan** | | | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Target | Realisasi Target | Capaian Target (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **II** | **Indikator 1 : Persentase Angka Sekolah**<br>**Indikator 2 : Persentase anak berkebutuhan Khusus yang mendapatkan akses pendidikan**<br>**Indikator 3 : Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B** | **80,10 persen**<br>**24,04 persen**<br>**87,38 persen** | **78,15 persen**<br>**56,75 persen**<br>**93,47 persen** | **97,57%**<br>**236,06 %**<br>**106,97 %** | **2.472.213.456,00** | **1.489.524.527,00** | **60,25%** |
| | **1** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** | **97,07 Persen** | **Persen** | **112,50%** | **1.231.743.732,00** | **755.663.525,00** | **61,35%** |
| | | 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4 Ruang | 5 Ruang | 88,00% | 922.641.650,00 | 471.946.897 | 51,15% |
| | | 2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 480 Orang | 480 Orang | 89,00% | 309.102.082,00 | 283.716.628,00 | 91,79% |
| | **2** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** | **87,52 persen** | **persen** | **112,50%** | **1.240.469.724,00** | **733.861.002,00** | **59,16%** |
| | | 1 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | 4 Ruang | 5 Ruang | 125,00% | 922.941.650,00 | 437.810.821,00 | 47,44% |
| | | 2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 480 Orang | 480 Orang | 100,00% | 317.528.074,00 | 296.050.181,00 | 93,24% |
| | **CABANG DINAS WILAYAH IV** | | | | | **2.938.339.304,00** | **2.590.308.297,20** | **88,16** |
| | **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BIDANG PENDIDIKAN)**<br>**Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan** | **100 Persen** | **100 Persen** | **108,28%** | **507.004.546,00** | **499.758.445,00** | **98,57%** |
| | **1** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **91,53%** | **219.220.054,00** | **219.113.804,00** | **99,95%** |
| | | 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50 Paket | 40 Paket | 80,00% | 53.240.796,00 | 53.240.796,00 | 100,00% |
| | | 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 960 Paket | 635 Paket | 66,14% | 29.000.000,00 | 28.980.000,00 | 99,93% |
| | | 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10 Paket | 10 Paket | 100,00% | 34.989.258,00 | 34.989.258,00 | 100,00% |
| | | 4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 120 Laporan | 120,00% | 101.990.000,00 | 101.903.750,00 | 99,92% |
| | **2** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **14 Orang** | **100%** | **100,00%** | **236.957.052,00** | **231.729.009,00** | **97,79%** |
| | | 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | 52.140.852,00 | 49.717.125,00 | 95,35% |
| | | 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6 Laporan | 10 Laporan | 166,67% | 184.816.200,00 | 182.011.884,00 | 98,48% |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | | Target | Realisasi Target | Capaian Target (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **100%** | **100%** | **100,00%** | **50.827.440,00** | **48.915.632,00** | **96,24%** |
| | | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 unit | 1 Unit | 100,00% | 50.827.440,00 | 48.915.632,00 | 96,24% |
| | **II** | **Program Pengelolaan Pendidikan** | | | | | | | |
| | | **Indikator 1 : Persentase Angka Sekolah**<br>**Indikator 2 : Persentase anak berkebutuhan Khusus yang mendapatkan akses pendidikan**<br>**Indikator 3 : Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B** | | **80,10 persen**<br>**24,04 persen**<br><br>**87,38 persen** | **78,15 persen**<br>**56,75 persen**<br><br>**93,47 persen** | **97,57%**<br>**236,06 %**<br><br>**106,97 %** | **2.431.334.758** | **2.090.549.852** | **85,98%** |
| | **1** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** | | **97,07 Persen** | **Persen** | **117,18%** | **1.210.073.355** | **1.202.166.620** | **100,00%** |
| | | 1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4 Ruang | 5 Ruang | 125,00% | 948.295.430,00 | 940.390.445,20 | 99,17% |
| | | 2 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 480 Orang | 525 orang | 109,00% | 261.777.925,00 | 261.776.175 | 100,00% |
| | **2** | **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** | | **87,52 persen** | **persen** | **117,18%** | **1.221.261.403** | **888.383.232** | **72,74%** |
| | | 1 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | 4 Ruang | 5 Ruang | 125,00% | 947.681.039,00 | 614.998.516,00 | 64,90% |
| | | 2 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 480 Orang | 525 Orang | 109,00% | 273.580.364,00 | 273.384.716,00 | 99,93% |
| **JUMLAH** | | | | | | | **2.914.402.826.922,00** | **2.702.615.586.438,23** | **92,73** |